

**GAMBARAN PENGETAHUAN PRAJURIT TNI TENTANG EVAKUASI DAN
TRANSPORTASI KORBAN BENCANA
DI BATALYON ARHANUD 13/PBY**

***DESCRIPTION OF TNI SOLDIERS' KNOWLEDGE OF DISASTER VICTIM'S
EVACUATION AND TRANSPORTATION IN BATALYON ARHANUD 13/PBY***

**An-Nisa Ul-Misbah¹, Meisa Daniati²,
Rani Lisa Indra³**

¹Program Studi Sarjana Keperawatan STIKes Hang Tuah Pekanbaru, email: ulmisbah98@gmail.com

^{2,3}Program Studi Sarjana Keperawatan STIKes Hang Tuah Pekanbaru

ABSTRAK

Latar belakang: TNI memiliki tugas operasi militer selain perang, yaitu membantu menanggulangi akibat bencana alam (evakuasi dan transportasi), pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Pengetahuan TNI dalam tindakan ini sangat diperhatikan karena TNI termasuk kedalam tim *rescue* pada saat terjadinya bencana. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengetahuan prajurit TNI tentang evakuasi dan transportasi korban bencana. **Metode:** Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner tentang evakuasi dan transportasi korban bencana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian dekskriptif dengan pendekatan *non random sampling (purposive sampling)* terhadap 127 prajurit. **Hasil:** Analisa data dilakukan dengan distribusi frekuensi. Hasil penelitian pengetahuan prajurit TNI tentang evakuasi dan transportasi termasuk kategori kurang yaitu 84 prajurit (66,1%). **Kesimpulan:** Peneliti berharap pihak TNI mengadakan pelatihan tentang evakuasi dan transportasi korban bencana terhadap prajurit.

Kata Kunci: Bencana, Evakuasi dan Transportasi, Pengetahuan, TNI

ABSTRACT

Background: The TNI executes other military operations than war, namely helping to cope with natural disasters (evacuation and transportation), shelter, and providing humanitarian assistance. The TNI's knowledge in this action is paramount concern because the TNI is included in the rescue team when a disaster occurs. **Aim:** The purpose of this research is to know the knowledge of TNI soldiers about the evacuation and transportation of disaster victims. **Methods:** The research instrument used a questionnaire about the evacuation and transportation of disaster victims. This research used quantitative research with descriptive research design and non-random sampling approach (*purposive sampling*) to 127 soldiers. Data analysis was conducted by using frequency distribution. **Results:** The results of the research on the knowledge of TNI soldiers about evacuation and transportation were in the poor category, namely 84 soldiers (66.1%). **Conclusion:** The researcher hopes the TNI will conduct training on the evacuation and transportation of disaster victims to soldiers.

Keywords: Disaster, Evacuation and Transportation, Knowledge, TNI

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, garis pantai yang dimiliki negara Indonesia dengan panjang $\pm 81.000 \text{ Km}^2$. Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2013 menyatakan jumlah pulau di Indonesia terdapat 13.466 pulau, luas daratan adalah $1.922.570 \text{ Km}^2$ (37,1%) dan luas lautan yang dimiliki Indonesia adalah $3.257.483 \text{ Km}^2$, total

wilayah yang dimiliki negara Indonesia adalah 5.180.053 Km² (BNPB, 2014). Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau, terletak pada tiga lempeng tonik dunia yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia yang dapat menyebabkan bencana gempa bumi, letusan gunung, tsunami, gerakan tanah (tanah longsor) dan bencana terkait hidrometrologi (BNPB, 2017).

Peningkatan kejadian bencana yang cukup signifikan terjadi diawal tahun 2019, yaitu 3.758 kejadian bencana dan menyebabkan 478 orang meninggal dan 109 orang hilang serta 6,1 juta menderita dan mengungsi. Bencana juga menyebabkan rumah rusak 73.305 dan fasilitas rusak 2.015 (BNPB, 2019a). Perbandingan yang terjadi pada tahun 2018 adalah Juli 2018 yaitu 1.601 kejadian bencana dan menyebabkan 170 orang meninggal dan hilang serta 3.817.244 lainnya terdampak dan mengungsi pada bulan Juli tahun 2018. Bencana juga telah mengakibatkan 33.926 rumah mengalami kerusakan (6.912 unit rusak berat, 7.489 unit rusak sedang, 19.525 unit rusak ringan) (BNPB, 2018b). UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggara penanggulangan bencana. BNPB menjadi penanggulangan bencana tingkat nasional dan bekerjasama dengan lembaga terkait, seperti TNI, POLRI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BMKG, BASARNAS, dan lembaga terkait lainnya (BNPB, 2017). Proses penanggulangan bencana oleh pihak terkait tersebut akan melibatkan pelayanan pada pasien gawat darurat. Pelayanan pada pasien dengan gawat darurat pada saat pelaksanaannya sering menggunakan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT (Wijaya, 2019).

SPGDT adalah sebuah sistem yang terdiri dari unsur, pelayanan prarumah sakit, pelayanan di rumah sakit, dan antar rumah sakit. Pelayanan ini berpedoman pada respon cepat yang menekan *time saving is life and limb saving*, dalam hal ini melibatkan multidisiplin mulai dari masyarakat umum dan khusus yang akan membantu dalam proses evakuasi awal sebelum pihak terkait datang, petugas medis (dokter, perawat, dll) sebagai tenaga profesional, aparat terkait (BNPB, POLRI, TNI, dll) sebagai tim *rescue* yang akan membantu tenaga medis, pelayanan *ambulance* gawat darurat, dan sistem komunikasi. Kemampuan dan kualitas dari penolong pasien akan sangat menentukan kelangsungan hidup pasien setelah terjadinya sebuah kejadian (Wibowo *et al.*, 2019).

UU RI tentang TNI menyatakan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok yang dimaksud dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, operasi militer selain perang diantaranya adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Salah satu tindakan membantu menanggulangi akibat bencana yang dilakukan oleh TNI adalah tindakan evakuasi korban dan transportasi korban (*UU RI Nomor 34 Tentara Nasional Indonesia*, 2004).

Evakuasi adalah proses pemindahan korban secara aman dan tepat dari lokasi yang berbahaya ke lokasi yang lebih aman untuk mendapat pertolongan lebih lanjut (Wijaya, 2019). Setelah melewati proses evakuasi, selanjutnya korban bencana akan diantar ke posko kesehatan atau pelayanan kesehatan dengan menggunakan transportasi yang menunjang. Transportasi korban adalah sarana yang digunakan untuk mengangkat korban dari lokasi bencana ke sarana kesehatan yang memadai dengan proses yang aman dan tepat. Transportasi terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya transportasi gawat darurat, transportasi pasien kritis dan transportasi pasien rujukan (Wijaya, 2019).

Peran TNI dalam tindakan evakuasi dan transportasi sudah diatur didalam KEPMENKES RI Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 yaitu terdapat 3 *ring* dalam pengorganisasi melakukan evakuasi dan transportasi pada kejadian bencana yaitu *ring 1* (kawasan kejadian) yang berisikan tim *rescue* (BASARNAS, TNI, DAMKAR), tim pengamanan (kepolisian), tim medis (bila lokasi kejadian sudah dinyatakan aman). *Ring 2* (kawasan pelayanan kesehatan) meliputi pertolongan pertama dan stabilitas korban, diantara *ring 1* dan *ring 2* terdapat garis polisi. *Ring 3* (kawasan publik) (Sya'ban, 2019).

Kejadian tsunami di Pangandaran tahun 2006 dan banjir bandang di Kecamatan Cihaurbeuti 2011 menunjukkan bahwa prajurit TNI KODIM 0613/Ciamis ikut serta membantu masyarakat dalam penanganan bencana sangat signifikan. Pihak KODIM 0613/Ciamis membantu secara cepat terhadap kerusakan yang terjadi, penentuan status bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Hediarto et al., 2016). Kesiapsiagaan prajurit KODIM 0101/BS dalam penanggulangan bencana di Banda Aceh didapatkan hasil dari 82 responden didapat 18 responden menjawab netral dan tidak setuju untuk menolong dan mengevakuasi korban. Kendala dan hambatan prajurit KODIM 0101/BS dalam upaya penanggulangan bencana adalah dari segi manajemen bencana (kurangnya paparan terhadap prajurit tentang proses dalam penanggulangan bencana), dan tanggung jawab penuh mengevakuasi korban ketika bencana (Gayoni et al., 2016).

Kapasitas KODIM 0505/Jakarta Timur dalam penanggulangan bencana banjir didapatkan hasil belum adanya pendidikan dan latihan yang secara signifikan untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam penanggulangan bencana pada saat bertugas, walaupun pada saat prajurit pendidikan telah mendapatkan teori terkait manajemen bencana secara umum. Belum adanya standar bagi personil yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Kondisi ini menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan belum dapat diukur tingkat keberhasilannya, baik pada saat pendistribusian logistik, pendirian posko, pengevakuasian korban dan hal terkait pada saat terjadinya bencana (Patria, 2013).

Hasil wawancara yang dilakukan kepada 10 prajurit (6 prajurit serda, 2 prajurit prada, 1 dansikes, 1 prajurit yang pernah mengikuti satgas) pada tanggal 26 Januari 2020 dan 2 Februari 2020 di Batalyon Arhanud 13/PBY. Didapatkan 6 orang prajurit berpangkat serda dan 2 orang prajurit berpangkat prada pernah mengikuti penanggulangan bencana karhutla. Saat proses evakuasi dan transportasi korban bencana 3 prajurit berpangkat serda dan 1 prajurit berpangkat prada sudah pernah mengikuti proses evakuasi dan transportasi, dan 4 prajurit tidak pernah mengikuti proses evakuasi dan transportasi.

Hasil wawancara bersama Dansikes didapatkan bahwa prajurit TNI yang turun pada saat penanggulangan bencana tidak terdapat kriteria khusus, prajurit yang turun ke lapangan adalah prajurit yang diperintah oleh komandan yang harus dipatuhi. Saat penanganan evakuasi korban, diawal akan dibagi menjadi beberapa tim lalu dilakukan *briefing* dan pada saat proses pengevakuasian dilakukan oleh prajurit TNI yang tidak hanya berfokus dibidang kesehatan, dansikes juga mengatakan bahwasanya prajurit TNI pada masa pendidikan sudah mendapat teori/pembelajaran terkait manajemen bencana secara umum yang lebih dikenal dengan pendidikan keslap (kesehatan lapangan). Salah seorang prajurit TNI (bukan bidang kesehatan) yang sudah melakukan SATGAS (satuan penugasan) pada peristiwa tsunami di Aceh mengatakan untuk pengevakuasian korban bencana, mereka tidak dilengkapi atau minim dengan APD, serta alat-alat penunjang untuk membantu pengevakuasian korban bencana secara optimal. Berdasarkan hal ini, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengetahuan TNI tentang evakuasi dan transportasi korban bencana.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif yang dilaksanakan di Batalyon Arhanud 13/PBY. Jumlah populasi 522 prajurit

dengan besar sampel 152 prajurit menggunakan *Lemeshow*. Penelitian ini menggunakan *non random sampling (purposive sampling)*.

HASIL

Hasil penelitian yang dilakukan dari bulan juli sampai bulan September 2020 pada 127 prajurit di Batalyon Arhanud 13/PBY, dengan data yang diperoleh sebagai berikut:

1. Total 127 responden yang diteliti, usia mean (rata-rata) pada penelitian ini adalah 25,06 tahun.
2. 127 responden yang diteliti, golongan prajurit tamtama dengan distribusi frekuensi terbanyak adalah pangkat Prada dengan jumlah prajurit 56 orang (44,1%) dan untuk prajurit golongan bintara Serda berjumlah 7 orang (5,5%).
3. 127 responden yang diteliti, tahun angkatan dengan distirbusi terbanyak adalah tahun angkatan 2018 sebanyak 23 prajurit (18,1%).
4. 127 responden yang diteliti, pengalaman penanganan dalam kebencanaan dengan distirbusi terbanyak adalah bencana karhutla sebanya 82 prajurit (64,%).
5. 127 responden yang diteliti, distirbusi terbanyak adalah prajurit tidak pernah mengikuti pelatihan tentang evakuasi dan transportasi korban bencana yaitu sebanyak 110 prajurit (86,6 %).
6. 127 responden yang diteliti, distribusi frekuensi variabel kategori tingkat pengetahuan prajurit dengan distribusi terbanyak yaitu kurang dengan jumlah 84 prajurit (66,1%).

PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa rata-rata usia yang mengikuti penelitian ini adalah usia 25,06 tahun. Penelitian pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa saat semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja, sehingga membuat usia sangat berpengaruh untuk memperoleh perkembangan pengetahuan (Dharmawati & Wirata, 2016). Usia rata-rata pada penelitian ini adalah usia 25,06 tahun, hal ini dikarenakan pada saat penelitian lebih dominan usia yang berada pada usia 20 tahun keatas karena yang menepati asrama terbanyak di usia tersebut dan usia yang lebih tua cenderung memiliki tugas yang lebih penting untuk dikerjakan.

Golongan Tamtama pangkat Prada dengan jumlah prajurit 56 orang (44,1%) merupakan pangkat dengan distribusi terbanyak pada penelitian ini. Berdasarkan peraturan panglima TNI

(2011), pangkat Prada adalah pangkat terendah di kesatuan TNI dalam golongan tamtama dan juga jumlah prajurit dalam satu Batalyon golongan tamtama merupakan golongan terbanyak dalam kesatuan. Didalam penelitian ini didapatkan distribusi terbanyak adalah pangkat prada, hal ini dikarenakan pangkat yang lebih tinggi memiliki tugas yang lebih utama dan penting yang harus dikerjakan sesuai dengan pangkat, serta dalam kesatuan TNI rasa senioritas masih dijunjung tinggi hal ini juga sangat berpengaruh dalam pendistribusian pangkat yang mengikuti penelitian karena akan lebih diutamakan yang mengikuti penelitian adalah pangkat yang terendah.

Data karakteristik untuk tahun angkatan didapatkan tahun angkatan dengan distribusi terbanyak adalah tahun angkatan 2018 sebanyak 23 prajurit (18,1%). Angkatan atau lebih sering dikenal dengan *letting* merupakan sebuah sebutan dimana sekelompok prajurit menyelesaikan pendidikan dalam tahun yang sama (Admin, 2019). Didalam penelitian ini didapatkan distribusi terbanyak adalah tahun angkatan 2018 dan bisa dikatakan masih junior, hal ini dikarenakan selama proses penelitian tahun angkatan senior dominan mendapat tugas diluar kota dan berdomisili diluar dari asrama Batalyon, serta hal ini juga sejalan dengan hasil data karakteristik pangkat dari responden karena pangkat *letting* 2018 yang merupakan tahun angkatan kedua termuda dikesatuan maka pangkat yang masih dipegang oleh prajurit tersebut adalah pangkat Prada.

Data karakteristik untuk pengalaman penanganan dalam kebencanaan dengan distribusi terbanyak adalah bencana karhutla sebanyak 82 prajurit (64,%), dan data karakteristik untuk pelatihan tentang evakuasi dan transportasi korban bencana distribusi terbanyak adalah prajurit tidak pernah mengikuti pelatihan tentang evakuasi dan transportasi korban bencana yaitu sebanyak 110 prajurit (86,6 %). Tugas TNI, sudah ditetapkan pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa tugas pokok TNI terbagi menjadi dua yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Salah satu poin dalam tugas operasi militer selain perang adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan serta membantu *search* dan *rescue*. Dilihat dari pengalaman prajurit TNI dalam penanganan kebencanaan didapatkan penanganan karhutla lebih dominan, karena prajurit TNI yang mengikuti penelitian bertugas di pulau Sumatra, dimana bencana yang paling sering adalah karhutla yang sangat jarang menimbulkan korban jiwa. Dalam hal pelatihan yang pernah diikuti prajurit terkait evakuasi dan transportasi korban bencana mendapat hasil lebih dari 100 orang prajurit tidak pernah mengikuti pelatihan karena prajurit lebih berfokus kepada persiapan

untuk peperangan serta prajurit juga lebih dominan banyak mengikuti pelatihan TMMD (Tentara Menunggal Membangun Desa) dimana dalam hal ini prajurit berfokus dalam keikutsertaan pembangunan desa.

Gambaran Pengetahuan tentang Evakuasi dan Transportasi Korban Bencana

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pengetahuan prajurit tentang evakuasi dan transportasi korban bencana dalam kategori kurang dengan jumlah prajurit yaitu 84 prajurit (66,1%), dengan uraian pengetahuan prajurit lebih dominan kurang dalam pengetahuan evakuasi korban bencana yaitu sebanyak 87 prajurit (68,5%). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patria (2013), yaitu belum adanya standarisasi kemampuan yang dikhususkan bagi personil yang terlibat dalam tugas penanggulangan bencana serta sampai saat ini pemerintah belum ada menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh personil yang akan turun kelapangan. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian Gayoni, Taqwaddin, et al., (2016), dimana dari 82 responden didapat 18 responden menjawab netral dan tidak setuju dalam pengevakuasian korban bencana dan dalam penelitian juga didapatkan kurangnya pemaparan kepada prajurit serta minimnya rasa tanggung jawab terhadap pengevakuasian korban bencana.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan, salah satu tugas pokok TNI selain perang adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan serta membantu *search* dan *rescue*. Permenhan (2011) tentang pokok-pokok penyelenggaraan tugas bantuan Tentara Nasional Indonesia dalam menanggulangi bencana, pengungsian dan bantuan kemanusiaan menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan pihak TNI adalah penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, penanganan pengungsian serta pemulihan sarana dan prasarana umum.

Dilihat juga dari hasil data karakteristik yang didapat, bahwasanya pangkat dan tahun angkatan dengan distribusi terbanyak adalah pangkat Prada yang merupakan pangkat terendah dalam kesatuan TNI dan tahun angkatan 2018 yang merupakan tahun angkatan termuda kedua di kesatuan. Kedua hal ini sejalan, karena tahun angkatan 2018 dominan masih memegang pangkat Prada dan tentu saja berpengaruh dalam hasil penelitian karena prajurit tersebut belum lama masuk kedalam dunia militer dan minim akan pengalaman. Hasil data karakteristik prajurit tentang pengalaman penanganan kebencanaan, prajurit dominan menjawab menangani bencana karhutla, dimana bencana ini sangat jarang menimbulkan korban jiwa dan lebih berinteraksi dengan tumbuhan dan hewan ketimbang dengan manusia.

Kemudian tentang pelatihan yang pernah diikuti didapatkan lebih dari 100 prajurit tidak pernah mengikuti pelatihan terkait hal ini, tentu saja hal ini juga menjadi pendorong mengapa pada penelitian ini pengetahuan TNI termasuk kedalam kategori kurang karena prajurit minim akan pengalaman, tidak pernah mendapatkan pelatihan terkait kebencanaan serta minimnya pemaparan pada saat masa pendidikan terkait kebencanaan.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan prajurit TNI sangat perlu diperhatikan karena dari hasil penelitian yang dilakukan kategori pengetahuan prajurit TNI tentang evakuasi dan transportasi korban bencana termasuk kedalam kategori kurang. Mengingat juga keterlibatan pihak TNI sangat besar dalam pelaksanaan penyelamatan korban bencana dan tindakan awal yang dilakukan pada saat proses penyelamatan korban bencana adalah evakuasi dan transportasi terhadap korban.

KESIMPULAN

Tentara Nasional Indonesia atau TNI memiliki tugas operasi militer selain perang yaitu membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Salah satu tindakan dalam membantu menanggulangi akibat bencana alam adalah tindakan evakuasi dan transportasi korban akibat bencana alam (*UU RI Nomor 34 Tentara Nasional Indonesia*, 2004). Tindakan evakuasi dan transportasi merupakan tindakan awal dalam penyelamatan korban jiwa dan untuk menekan angka kecacatan dan kematian korban jiwa.

Penelitian berharap pihak TNI agar dapat mengevaluasi kembali dan memberikan paparan terhadap prajurit yang memiliki tingkat pengetahuan kurang. Dan juga diharapkan pihak TNI memberikan kegiatan seperti memberikan materi secara berkala pada prajurit agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan tentang evakuasi dan transportasi korban bencana mengingat negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam kejadian bencana dan keterlibatan TNI sangat berpengaruh serta TNI dapat bekerjasama dengan pihak terkait seperti BASARNAS untuk memberikan pemaparan terkait evakuasi dan transportasi korban bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2019). *Siapa Sangka, Ternyata Inilah Makna dan Arti Letting Bagi Prajurit TNI*. <https://www.koranmiliter.com/2019/10/siapa-sangka-ternyata-inilah-makna-dan-arti-letting-bagi-prajurit-tni.html>
- BNPB. (2014). *Rencana nasional penanggulangan bencana 2015-2019*. <https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-renas-pb.pdf>

- BNPB. (2017). *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. https://siaga.bnpb.go.id/hkb/po-content/uploads/documents/Buku_Saku-10Jan18_FA.pdf
- BNPB. (2018a). *Info Bencana Desember 2018* (Issue Desember). <https://bnpb.go.id/uploads/24/info-bencana-desember-2018.pdf>
- BNPB. (2019a). *Infografis Bencana Tahun 2019*. https://twitter.com/bnpb_indonesia/status/1210224624253800450
- BNPB. (2019b). *Infografis Data Bencana Periode 1 Januari 2019 Hingga 31 Desember 2019*. <https://bnpb.go.id/berita/2020-01-20-infografis-update-bencana-31-des-2019-per20jan2020jpg>
- BPBD. (2016). *Sistem Komando Tanggap Darurat*. <https://twitter.com/bpbdkabmjl/status/795836490932592640?lang=bg>
- Dharmawati, I. G. A. A., & Wirata, I. N. (2016). Hubungan Tingkat Pendidikan, Umur, Dan Masa Kerja Dengan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Guru Penjaskes Sd Di Kecamatan Tampak Siring Gianyar. *Jurnal Kesehatan Gigi*, 4(1), 1–5. http://www.poltekkes-denpasar.ac.id/keperawatangigi/wp-content/uploads/2017/02/ilovepdf_merged.pdf
- Donsu, J. (2016). *Metodologi penelitian keperawatan*. Yogyakarta : PT. PUSTAKA BARU.
- Dwidiyanti, M., Hadi, I., Wiguna, R. I., & Ningsih, H. E. W. (2018). Gambaran Risiko Gangguan Jiwa pada Korban Bencana Alam Gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat. *Holistic Nursing and Health Science*, 1(2), 82. <https://doi.org/10.14710/hnhs.1.2.2018.82-91>
- Gayoni, Taqwaddin, & Yanis. (2016). Optimalisasi kesiapsiagaan prajurit kodim 0101/bs dalam penanggulangan bencana di banda aceh. *Ilmu Kebencanaan*, 3(1), 7–12. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JIKA/article/view/11749>
- Hediarto, I., Armawi, A., & Martono, E. (2016). Optimalisasi Peran KODIM dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah(Studi Di KODIM 0613 / Ciamis , Jawa Barat). *Ketahanan Nasional*, 22(Ic), 321–333. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/15996>
- KemenkesRI. (2019). *Kebakaran Hutan dan Lahan Riau*. <http://www.pusatkrisis.kemkes.go.id/infografis-perkembangan-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-riau-tanggal-06-maret-2019>
- Patria, R. N. (2013). *Kapasitas TNI AD dalam Penanggulangan Bencana Alam STUDI KASUS: Kapasitas KODIM 0505 / Jakarta Timur*. 3(24), 157–182. <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/download/380/254>
- PERMENHAN. (2011). *Pokok-Pokok Penyelenggaraan Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia dalam Menanggulangi Bencana Alam, Pengsuaian dan Bantuan Kemanusiaan*. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn215-2011.pdf>
- PERPANGTNI. (2011). *Petunjuk Teknis Pola Karier Prajurit di Jajaran MABES TNI*. 101. <http://sejarah-tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/PERPANG-18-2011-JUKNIS-POLA-KARIR-DI-JAJARAN-MABES-TNI.pdf>
- Sya'ban, M. (2019). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik*. <https://www.scribd.com/document/429375822/Keputusan-Menteri-Kesehatan-Nomor-882-Tahun-2009-Tentang-Pedoman-Penanganan-Evakuasi-Medik>
- UU RI Nomor 34 Tentara Nasional Indonesia. (2004). <http://www.dpr.go.id>
- Widayatun, & Fatoni, Z. (2013). Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana:Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat (Health Problems in a Disaster Situation : the Role of Health Personnels and Community Participation). *Jurnal Kependudukan*

Indonesia, 8(1), 37–52.
<http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/21/15>
 Wijaya, A. (2019). *Kegawatdaruratan dasar*. Jakarta : CV. Trans Info Media.
 Yennizar, S. (2015). Desain Sistem Komando Dan Komunikasi Dalam Menghadapi Bencana Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*, ISSN 2302-, 86–93. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

	Mean	Median	Maksimal	Minimal	Standar Devisiasi
Usia (Tahun)	25,06	24	40	19	4,263

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pangkat

Pangkat	Frekuensi	%
Prada	56	44.1
Pratu	40	31.5
Praka	9	7.1
Kopda	8	6.3
Koptu	1	0.8
Kopral	2	1.6
Serda	7	5.5
Sertu	2	1.6
Serka	2	1.6
Total	127	100

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tahun Angkatan

Letting	Frekuensi	%
2002	1	0.8
2005	1	0.8
2006	3	2.4
2007	4	3.1
2008	2	1.6
2009	3	2.4
2010	7	5.5
2012	1	0.8
2013	6	4.7
2014	10	7.9
2015	15	11.8
2016	15	11.8
2017	16	12.6
2018	23	18.1
2019	20	15.7
Total	127	100

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengalaman Penanganan Kebencanaan

Jenis Bencana	Frekuensi	%
Karhutla	82	64.6
Tanah Longsor	11	8.7
Gempa Bumi	3	2.4
Banjir Bandang	5	3.9
Banjir	14	11.0
Tidak Memiliki Pengalaman	12	9.4
Total	127	100

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden Pelatihan tentang Evakuasi dan Transportasi Korban Bencana

Jenis Pelatihan	Frekuensi	%
Pelatihan Penanggulangan Karhutla	3	2.4
TMMD (Tentara Menunggal Membangun Desa)	13	10.2
Pelatihan Kebencanaan	1	0.8
Tidak Pernah Mengikuti Pelatihan	110	86.6
Total	127	100

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Prajurit tentang Evakuasi dan Transportasi Korban Bencana

Hasil ukur	Frekuensi	%
Baik	5	3.9
Cukup	38	29.9
Kurang	84	66.1
Total	127	100